

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (PERINDAGKOP)

1. Perindustrian

Industri adalah berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh perorangan maupun organisasi atau perusahaan.¹ hasil industri bukan hanya berupa barang, tetapi juga berbentuk jasa. Industri sering disamakan dengan manufaktur, padahal kedua istilah tersebut berbeda. Istilah manufaktur berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manufacture yang berarti kegiatan memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, lalu menjadi barang jadi.²

Al- Qur'an memberi penekanan umat terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman QS. Al- Balad ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

“Sesungguhnya kami menciptakan manusia padahal dia dalam kesusahan”(Q.S. Al Balad: 4)³.

¹Yeti Sumaryati, *Menerapkan Prinsip Professional Kerja SMK Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen*, (Bandung: CV Armico, 2010),1

²Yeti Sumaryati, *Menerapkan Prinsip Professional Kerja*,2

³Al-Qur'an dan Terjemah (Diponogoro, Bandung), 594

Saat ini beragam industri dapat kita temui. Untuk memudahkan kita, kesemua jenis industri tersebut dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai berikut

a. Klasifikasi industri berdasarkan hubungan vertikal

Hubungan vertikal dalam sebuah industri adalah hubungan yang terjadi akibat adanya penggunaan produk akhir suatu kelompok perusahaan sebagai bahan baku oleh kelompok perusahaan lain. Hubungan vertikal terdiri atas industri hulu dan hilir .

1) Industri Hulu

Industri hulu adalah perusahaan yang membuat produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku oleh perusahaan lain

2) Industri Hilir

Industri hilir adalah kelompok perusahaan yang menggunakan produk perusahaan lain sebagai bahan baku untuk kemudian diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Jadi , antara industri hulu dan industri hilir terdapat kaitan yang sangat erat. Dalam hal ini, produk dari industri hulu menjadi bahan baku pada industri hilir untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi lain atau barang setengah jadi lain.

b. Klasifikasi industri berdasarkan hubungan horizontal

Hubungan horizontal dalam suatu industri adalah hubungan sejajar antara beberapa produk yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dalam kelompok industri yang sama. Sebagai penjelasan.

- 1) Perusahaan X1 memproduksi tekstil dari kapas
- 2) Perusahaan X2 memproduksi tekstil dari bahan ool
- 3) Perusahaan X3 memproduksi tekstil dari bahan katun

Ketiga perusahaan X1, X2, dan X3 dikatakan memiliki hubungan horizontal.

c. Klasifikasi industri berdasarkan skala usahanya

Besar kecilnya usaha bisnis ditentukan oleh besar kecilnya modal yang ditanamkan. Klasifikasi industri berdasarkan skala usaha dapat dibagi menjadi 3 kriteria sebagai berikut.

- 1) Industri skala usaha kecil (*small scale industry*) modal yang ditanamkan antara Rp 50 juta sampai dengan Rp10 juta.
- 2) Industri skala usaha menengah (*small scale industry*) modal yang ditanamkan antara Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta.
- 3) Industri skala usaha besar (*small scale industry*) modal yang ditanamkan diatas Rp 500 juta.

d. Klasifikasi industri berdasarkan tingkat jenis produksinya

Berdasarkan tingkat jenis produksi, industri dapat digolongkan menjadi 3.

1) Industri Ringan

Jenis industri ringan adalah kelompok perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi. Misalnya industri makanan ternak, industri tepung, industri minuman dalam botol, industri makanan dalam kemasan, dll.

2) Industri Menengah

Yang termasuk Industri menengah antara lain industri ban mobil, industri semen, industri kimia, industri farmasi dll.

3) Industri Berat

Yang termasuk industri antara lain industri pembuatan traktor, pembuatan mesin mobil, industri pembuatan pesawat terbang, industri satelit, industri eksplorasi tambang didasar laut, dll.

e. Jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan

1) Industri Primer

Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu.

2) Industri Sekunder

Industri sekunder adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang-barang yang dapat diolah kembali (barang setengah jadi).

3) Industri Tersier

Industri tersier adalah industri yang menghasilkan produk berupa layanan jasa.⁴

2. Perdagangan

Perdagangan ialah bertemunya antara penjual dan pembeli, menurut istilah syara' jual-beli (ba'i) ialah : menerima hasil penjualan suatu barang berdasarkan syara', atau hanya manfaat yang diperkenankan syara', dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁵Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya-sendiri dan semua jual beli yang baik.⁶

3. Koperasi

Koperasi adalah berbeda beda dan menimbulkan diskusi-diskusi yang tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh idiologi tertentu Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerja sama. Pengertian yang dipengaruhi idiologi suatu Negara misalnya pengertian koperasi di Indonesia dikemukakan pada undang undang dasar republic Indonesia.⁷menurut undang undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian didalam pasal 3 dikemukakan

⁴Yeti Sumaryati, *Menerapkan Prinsip Professional Kerja*, 2-7

⁵Syekh Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul QaribPengantar Fiqih Imam Syafe'i*,(Surabaya: Tim Grafis Mutiara Ilmu, 2010),165

⁶Sohari, dkk.*Hadis Tematis*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), 83

⁷Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), 12

mengenai pengertian koperasi, yaitu: koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berawak sosial, beranggota orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸ Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I, Pasal I, ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁹

Jadi dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (PERINDAGKOP) adalah dinas yang memberdayakan UMKM Namun menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 yang disebut dengan usaha mikro adalah entitas yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta.¹⁰

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

⁸Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, 13

⁹Saiful Bahri dan Afif, *Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), 39

¹⁰Murpi Sollehudin, *Bisnis Plan Praktis dan Dahsyat untuk UMKM*, (Bekasi : Laskar Askara, 2007), 3.

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹¹

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah usaha keluarga yang mendekati miskin, yang dibantu oleh pemerintah dengan penyediaan kredit mikro.¹² Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

¹¹A. Zarkasi Effendi.,et.al., *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, (Malang: Averroes Press, 2012), 20.

¹²Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, 5

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.¹³

2. Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sedangkan sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh tangguh dan mandiri.¹⁴

Jadi dalam langkah pengawasan pembinaan UKM langkah awal dapat dimulai dengan proses untuk meningkatkan “kemampuan manajemen” (*copability to manage*), termasuk manajemen pemasaran dan keuangan serta prsonalia; dan langkah berikutnya meningkatkan “kesanggupan oprasional” (*copacity to execute*); dan langkah selanjutnya yang penulis anggep penting dalah menguasai “seni pengendalian bisnis” (*the art of controlling business*). Namun,

¹³<http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya>, di Akses Pada Tanggal 27-10-2016 Pukul 22:05 WIB

¹⁴Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, 6

untuk masuk ke dunia internasional dalam proses pembinaan UKM perlu ditambahkan faktor kunci ketiga, yakni TOT (transfer of technology). Perlu diingat bahwa dalam TOT ada dua hal yang dianggap penting, yakni “kemampuan” untuk menerima dan menguasai alih teknologi (adaptation process) dan setelah itu dilanjutkan dengan “kemampuan melakukan inovasi”. Untuk melaksanakan inovasi maka perusahaan perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi (adaptation and diffusion process) dan memiliki daya pengembangan inovasi.¹⁵

3. Ruang Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Tujuan pengelompokan usaha/bisnis dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencakup pada 4 macam

- a. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoretis)

Analisis ilmiah, khususnya ilmu ekonomi, membahas kaidah-kaidah dan hukum-hukum ekonomi yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok usaha tersebut, baik secara mikro maupun makro. Teori Ekonomi Mikro meneliti dan mempelajari kelompok-kelompok usaha mulai dari perilaku pasar, rumah tangga, produksi, juga membahas ongkos-ongkos produksi, penghasilan, pendapatan, dan juga mengenai kesejahteraan karyawannya.

¹⁵Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, 7

b. Untuk keperluan penentuan kebijakan pemerintah

Dalam hubungannya dengan pemerintah atau badan yang mempunyai otoritas mengatur, pengelompokan pengelompokan bisnis diperlukan gambaran yang sistematis tentang kondisi dan kegiatan tiap industri secara nasional. Seperti Biro Pusat Statistik (BPS) telah menyusun data menurut golongan-golongan industri makanan, industri tekstil, industri kulit, industri kayu dan industri barang-barang kayu, industri kertas, percetakan, dan lain sebagainya. System pendataan tersebut telah membaku, dimana juga UNIDO menyusun pembakuan golongan-golongan industri/bisnis dengan yang disebut: Internasional Standard Industrial Classification (ISIC). Penggolongan-penggolongan tersebut diperinci lebih lanjut menjadi sub-sub golongan/ kelompok yang semuanya diberi kode pengenal.

c. Untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya

Dalam kaitannya tentang posisi perusahaan tertentu pemilik modal/kelompok pemodal melalui pengelompokan perusahaan/industri dapat menilai seberapa besar pangsa pasar yang diperankan atau seberapa luas kegiatan bisnisnya dibandingkan dengan para pesaing lainnya.

d. Untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan

Bank-bank atau insitusi investasi/permodalan memerlukan data umum dengan menggunakan data setatistik kelompok industri guna mengevaluasi terhadap calon nasabah dalam rangka pemberinan kredit/investasi.Selain itu, agar rencana perluasan kegiatan/usaha dapat dipertanggung jawabkan, maka pemekaran investasi/kredit oleh pihak perbankan dapat dinilai seberapa besar dalam industri bersangkutan.¹⁶

4. Faktor penghambat pendukung Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Huduke dan Ryan 2006, dalam bukunya yang berjudul *small Busines, and Entrepreneurs*, memberikan sepuluh petunjuk yang menyebabkan wirausahawan mengalami kegagalan dan petunjuk tentang bagaimana agar pelaku usaha memperoleh keberhasilan. Kesepuluh petunjuk yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Sepuluh faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha
 - 1) Pribadi yang lemah.
 - 2) Sikap suka menyendiri.
 - 3) Gagasan yang saar dalam berbisnis.
 - 4) Tidak memiliki rencana.
 - 5) Dukungan dana yang terlalu kecil.
 - 6) Kesulitan dalam arus kas.
 - 7) Tidak memiliki strategi.

¹⁶ Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, 5

- 8) Tidak ada pengendalian.
 - 9) Penempatan orang yang salah
 - 10) Menganggap rendah kepada pesaing
- b. Sepuluh faktor yang bisa menjadikan keberhasilan berwirausaha
- 1) Niat yang kuat untuk mencapai keberhasilan.
 - 2) Memiliki keyakinan yang tinggi.
 - 3) Gagasan bisnis yang jelas.
 - 4) Memiliki rencana usaha.
 - 5) Pengendalian uang yang ketat.
 - 6) Menetapkan target pasar.
 - 7) Berusaha selangkah lebih maju dari pesaing.
 - 8) Dukungan dari manajemen.
 - 9) Membina kemitraan,
 - 10) Struktur organisasi perusahaan yang jelas.¹⁷

C. Konsep Pendapatan

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Landasannya, jika seseorang yang berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih misalnya dalam bentuk pendapatan, maka

¹⁷Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alfabeta, 2012), 38

tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali mengakui adanya hak milik. Motivasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.¹⁸

Peningkatan ekonomi erat hubungannya dengan pendapatan, sebab salah satu indikator untuk mengukur peningkatan ekonomi masyarakat atau daerah adalah pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*). Ada tiga sumber penerimaan pendapatan:

1. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat bergantung dari produktivitasnya. Pendapatan dapat diklasifikasikan antara lain:

- a. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
- b. Pendapatan disposabel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposabel.
- c. Pendapatan Nasional yaitu hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh penduduk suatu Negara.¹⁹

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2007), 120.

2. Pendapatan dari Aset Produktif

Aset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atau balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. *Pertama*, aset finansial (*financial assets*), seperti deposito, yang menghasilkan pendapatan bunga; saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjualbelikan. *Kedua*, aset bukan finansial (*real assets*), seperti rumah yang memberikan pengashilan sewa.

3. Pendapatan dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.²⁰

Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aktiva lain sebuah entitas atau penyelesaian kewajibannya (atau suatu kombinasi keduanya) dari pengiriman atau pembuatan barang, pembarian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama atau sentral yang masih berlangsung dari entitas tersebut.²¹ Pendapatan dapat diartikan sebagai kenaikan kekayaan bersih (*net assets*) perusahaan, selain dari transaksi-transaksi modal. Besarnya pendapatan diukur dengan aktiva yang baru diterima dari:

¹⁹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 60.

²⁰Pratama Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 292.

²¹Selamet Sugiri dan Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 18

- a. Penjualan barang atau jasa perusahaan
- b. Bunga, sewa, royalti, deviden dan atau pembagian pendapatan
- c. Keuntungan bersih dari penjualan aktiva selain barang dagangan atau produk jadi
- d. Keuntungan yang berasal dari pelunasan hutang²²

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.²³ Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli.²⁴ Pendapatan (*revenue*) adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang-barang atau jasa yang dijual belikan.²⁵

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, Abdullah Said
 “Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

²²Hendrieta Ferieka, *Pengantar Akuntansi*, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), 17

²³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 340

²⁴Hendrieta Ferieka, *Pengantar Akuntansi*, 49

²⁵Hendrieta Ferieka, *Pengantar Akuntansi*, 130

Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). Peranan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada UKM di Kota Malang yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang diharapkan untuk mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada di Malang.²⁶

Dewi Wuryandan dan Hilma Meilani “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Keberadaan UMKM di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan membantu program pemerintah karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Provinsi

²⁶Hesti Kusuma, dkk “Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang potensial dari segi akademis, merupakan sumber calon-calon *entrepreneur* muda yang kreatif dan inovatif. Namun tanpa dukungan dan dorongan yang maksimal dari pemerintah daerah, hal tersebut akan menjadi kendala. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah (1) pemasaran, (2) modal atau pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) ketersediaan bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan eksternal. Masih adanya tumpang tindih kebijakan antar daerah, juga antar daerah dan pusat, sehingga pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas ekspor.²⁷

Rini Tumiar Nainggolan, Peran Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan pengrajin sarung samarinda di kecamatan samarinda seberang. Indikator penelitian ini antara lain: 1) koordinasi; 2) pembinaan; 3) Monitoring dan Evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research, analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

²⁷Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1, 2013.

kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sudah berusaha melakukan upaya pemberdayaan terhadap pengrajin sarung samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang melalui pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dalam upaya pemberdayaan tersebut Dinas Koperasi dan UKM menyusun berbagai program pemberdayaan namun program-program tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi saran adalah sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM lebih meningkatkan perannya demi tercapainya tujuan pemberdayaan untuk menjadikan pengrajin sarung samarinda yang mandiri serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerajinan sarung samarinda sehingga perkembangan ekonomi kerakyatan dalam hal ini pengrajin sarung samarinda dapat terwujud dan sejalan pada otonomi daerah Samarinda.²⁸

E. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.²⁹ Hipotesis dari penelitian ini adalah:

²⁸Rini Tumiar Nainggolan, “Peran Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Pengrajin Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang”, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No. 2, 2015

²⁹Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Edisi 2, 34

H_0 = Diduga tidak adanya pengaruh yang signifikan dari dinas PERINDAGKOP terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah kota Serang.

H_a = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari dinas PERINDAGKOP terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil menengah kota Serang.